

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era reformasi ini, instansi pemerintah dituntut untuk dapat menyajikan capaian atas keberhasilan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kemampuan penyampaian informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah organisasi (Safitri, 2020). Bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah harus disiapkan, disusun dan disampaikan dalam bentuk informasi kinerja dengan cara tertulis, periodik, dan melembaga.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2003), akuntabilitas adalah bentuk jawaban serta penjelasan kinerja dan tindakan kepada pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua jenis pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah pusat dan pertanggungjawaban horizontal kepada DPRD serta masyarakat luas (Mardiasmo, 2009). Jenis tanggung jawab pemerintah merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas. Bentuk pertanggungjawaban ini berupa laporan yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Anggaran harus digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja berorientasi hasil. Upaya dalam mendorong akuntabilitas kinerja tersebut, Kementerian PANRB mengadakan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah setiap tahunnya. Pada tahun 2019, hasil evaluasi SAKIP menunjukkan perbaikan yang dapat dilihat

dengan meningkatnya rata-rata hasil evaluasi pada tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Menurut Akbar (2020) dalam infopublik.id, rata-rata nilai hasil evaluasi kabupaten/kota tahun 2018 sebesar 56,53 menjadi 58,97 di tahun 2019. Sedangkan untuk tingkat provinsi, pada tahun 2018 nilai rata-rata sebesar 67,28 menjadi 69,63 di tahun 2019.

Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian, selain untuk menilai intansi pemerintah, rapor SAKIP juga untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah sehingga mempermudah dalam proses perbaikan SAKIP. Dalam rapor SAKIP juga terdapat rekomendasi supaya pemerintah daerah dapat melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan anggaran supaya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan pengujian terhadap akuntabilitas kinerja yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai variabel independen. Penelitian ini akan dilakukan pada instansi pemerintah. Bentuk akuntabilitas kinerja yang akan diteliti sebagai variabel dependen adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, AKIP adalah

”Perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.”

Pada penelitian ini, variabel independen pertama adalah sistem pelaporan.

Menurut Abdullah (2005), sistem pelaporan adalah informasi yang berisi gambaran

pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan sistem pelaporan digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan serta informasi lain yang dapat digunakan untuk membuat keputusan ekonomi, sosial, politik oleh pihak yang berkepentingan.

Variabel independen yang kedua adalah pengendalian akuntansi. Menurut Mardiasmo (2009), pengendalian akuntansi merupakan sistem pengendalian formal, berbasis, dan memiliki tujuan untuk mengelola sumber daya yang ekonomis, efisien dan efektif. Pengendalian akuntansi adalah pengendalian internal yang memberikan informasi yang akurat dan menyiapkan laporan sesuai dengan kriteria (Romney & Steinbart, 2015). Pengendalian wajib dikembangkan agar keputusan yang diambil sesuai dengan rencana dalam mencapai tujuan yang ditetapkan bagi organisasi.

Variabel independen yang ketiga adalah anggaran berbasis kinerja. Menurut Halim (2007), anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran manajemen dalam mengalokasikan pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan dengan *output* serta hasil yang diharapkan. Dalam organisasi sektor publik, anggaran harus diketahui oleh masyarakat agar dapat mengevaluasi, mengkritik dan memberi masukan untuk meningkatkan kinerja masyarakat. Dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja, diharapkan anggaran dapat digunakan secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan pengujian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai variabel independen yang terdiri dari sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, anggaran berbasis kinerja. Variabel tersebut sudah pernah digunakan peneliti terdahulu untuk diuji pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2020) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen memberikan hasil bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Agustin (2018) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta memberikan hasil bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Bernadine (2018) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten memberikan hasil bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini dilakukan untuk menggabungkan berbagai variabel independen yang meliputi sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, anggaran berbasis kinerja yang telah diteliti pada penelitian terdahulu terhadap akuntabilitas kinerja. Sebelumnya telah banyak penelitian yang menganalisis variabel independen tersebut, namun memberikan hasil yang berbeda – beda. Karena perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti ingin menguji kembali pengaruh variabel independen tersebut terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kemudian peneliti memilih Kabupaten Temanggung sebagai subjek penelitian karena berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019, pemerintah kabupaten Temanggung mendapatkan nilai SAKIP B dengan nilai 60,16 (<https://temanggungdaily.com>). Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan nilai B karena beberapa hal, yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu meningkatkan kualitas laporan kinerja baik ditingkat kabupaten maupun OPD dengan perlunya memastikan laporan kinerja dapat digunakan sebagai feedback perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
2. Pemerintah Kabupaten Temanggung belum melakukan reviu secara berkala untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja berkaitan dengan kualitas perumusan tujuan, penyajian analisis efesisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja serta memanfaatkan hasil reviu untuk perbaikan kinerja organisasi dan penyusunan struktur organisasi.
3. Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu mengembangkan aplikasi manajemen kinerja secara terintegrasi mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja dan penganggaran sehingga dapat mengoptimalkan penerapan performance based budgeting secara konsisten di tingkat OPD.

Berdasarkan masalah yang ada di Kabupaten Temanggung, peneliti ingin mengetahui apakah sistem pelaporan, pengendalian akuntansi dan anggaran berbasis kinerja mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Kabupaten Temanggung. Variabel pertama adalah sistem pelaporan, diharapkan dengan adanya sistem pelaporan yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan sehingga dapat memperbaiki perencanaan dan meningkatkan kinerja. Lalu variabel yang kedua adalah pengendalian akuntansi, pentingnya mengukur, mereview, dan mengevaluasi capaian kinerja agar dapat dijadikan motivasi pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Variabel yang ketiga adalah anggaran berbasis kinerja, dengan penerapan anggaran berbasis kinerja diharapkan penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat lebih sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Temanggung?
2. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Temanggung?
3. Apakah anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Temanggung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggabungkan beberapa variabel independen yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu, sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Temanggung.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian terdahulu yang meliputi sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pelengkap dalam pengembangan penelitian-penelitian berikutnya.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Temanggung agar lebih memperhatikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Temanggung.